

**Analisa Dampak Kebijakan Corona Virus Desease 2019 Terhadap
Operasional Bus di Kabupaten Ogan Komering Ulu****Octa Diaz Rohilza¹, Abdullah Idi², Sutinah³**¹Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik STISIPOL Candradimuka, Indonesia²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia³STISIPOL Candradimuka, Indonesia

E-mail : sutina08@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Dampak Kebijakan Covid-19 Terhadap Operasional Bus di Kabupaten Ogan Komering Ulu bertujuan untuk mengetahui keefektifitasan penyidikan tindak pidana narkoba dan obat-obat berbahaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai keadaan tertentu, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat terpisah-pisah untuk memperoleh kesimpulan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Dampak Kebijakan Covid-19 Terhadap Operasional Bus di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan menggunakan 3 dimensi efektifitas menurut (sterrs,2005) menunjukkan dari dimensi *Input* : Adanya kerjasama yang baik antara petugas dan masyarakat sehingga pada penilaian efektivitas sangat baik dirasakan dengan adanya komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat melalui pelaporan kasus. Dimensi *Proses* : adanya pengorganisasian tim dan anggota yang kompeten sehingga perencanaan dalam melakukan tindakan dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku pada penyidikan. Sedangkan dimensi *Output* : dengan bertambahnya kasus di Sumatera Selatan terkait tindak pidana narkoba dan obat-obatan berbahaya, memberikan tugas yang lebih dan serius kepada instansi untuk dapat terus melakukan pengembangan dan evaluasi terhadap penyelesaian kasus narkoba dan obat-obatan berbahaya dengan pengawasan, pengendalian serta evaluasi yang dapat dilakukan secara berkala dan berjenjang setiap bulan.

Kata kunci : Dampak, Kebijakan, Covid-19 dan Operasional Bus**ABTRACT**

The research entitled Effectiveness of Investigation of Drug Crimes and Dangerous Drugs in the South Sumatra Police Legal Area aims to determine the effectiveness of investigations into criminal acts of drugs and dangerous drugs. This study uses a qualitative approach, which is a research procedure that aims to describe certain circumstances, which are described in separate words or sentences to obtain conclusions. The focus of the research in this study is the Effectiveness of Investigation of Criminal Acts of Drugs and Dangerous Drugs in the Legal Territory of the South Sumatra Regional Police. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques, while the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the study using 3 dimensions of effectiveness according to (Sters, 2005) show that from the Input dimension: There is good cooperation between officers and the community so that the effectiveness assessment is very well felt by good communication between officers and the community through case reporting. Process Dimension: there is an organization of competent teams and members so that planning for taking action can run smoothly, in accordance with standard operating procedures applicable to the investigation. While the Output dimension: with the increase in cases in South Sumatra related to drug crimes and dangerous drugs, giving more and more serious tasks to agencies to be

able to continue to develop and evaluate the settlement of drug cases and dangerous drugs with supervision, control and evaluation. which can be done periodically and in stages every month.

Keywords: *Effectiveness, Investigation, Drug Crime and Drug Dangerous.*

PENDAHULUAN

Kebijakan transportasi yang diterapkan pemerintah daerah terkait COVID-19 merupakan pembatasan pelayanan angkutan umum di Sumsel, meski banyak yang mengkritik karena menyebabkan padatnya lalu lintas penumpang, overtourism di Sumsel. Aturan dasar untuk memperlambat laju pandemi COVID-19 adalah social distancing atau jarak sosial. Sektor transportasi berperan dalam menjamin kelangsungan pasokan kebutuhan pokok dan kebutuhan industri pendukung lainnya seperti makanan, farmasi, bahan bakar, listrik dan lain-lain. Terganggunya pasokan pangan yang bisa lebih mematikan dari pandemi itu sendiri, tentu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sekali lagi, aturan utama yang harus diikuti adalah mengurangi lalu lintas. Selain itu, daya angkut barang melalui udara, laut, dan kereta api harus dijaga untuk menjamin pasokan obat-obatan dan kebutuhan.

Otoritas Perhubungan Sumsel, khususnya Otoritas Ogan Komering Ulu, memberlakukan pembatasan jam operasional dan jumlah penumpang bus Antar Kota dan Antar Provinsi (AKAP) selama masa PSBB. Namun saat ini, operasional bus AKAP hanya tersedia untuk penumpang yang memenuhi kriteria perjalanan. Hal itu dibuktikan dengan dibukanya kembali layanan bus yang beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan dan aturan kriteria yang ditetapkan bagi penumpang. memenuhi

kriteria izin perjalanan. Sementara itu, kasus angkutan bus beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dengan penyebaran virus Corona atau Covid19. Beberapa waktu lalu, Presiden Organisasi Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Selatan (Organda) mengatakan seluruh armada bus akan ditutup sementara, sehingga berdampak pada para sopir bus yang pulang, karena Pengangguran juga meningkat selama periode tersebut. panggung = panggung Setelah bisnis angkutan umum terpengaruh dan pemerintah dapat menyiapkan program untuk memulihkan 100% bisnis angkutan umum, bus yang beroperasi di Indonesia tidak akan beroperasi lagi.

Otoritas Perhubungan Sumsel, khususnya Otoritas Ogan Komering Ulu, memberlakukan pembatasan jam operasional dan jumlah penumpang bus Antar Kota dan Antar Kota (AKAP) selama masa PSBB. Namun saat ini, operasional bus AKAP hanya tersedia untuk penumpang yang memenuhi kriteria perjalanan. Hal itu dibuktikan dengan dibukanya kembali layanan bus yang beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan dan aturan kriteria yang ditetapkan bagi penumpang. memenuhi kriteria izin perjalanan. Sementara itu, kasus angkutan bus beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dengan penyebaran virus Corona atau Covid19. Beberapa waktu lalu, Presiden Organisasi Angkutan Jalan Provinsi

Sumatera Selatan (Organda) mengatakan seluruh armada bus akan ditutup sementara, sehingga berdampak pada para sopir bus yang pulang, karena Pengangguran juga meningkat selama periode tersebut. tanggung = tanggung Setelah bisnis angkutan umum terpengaruh dan pemerintah dapat menyiapkan program untuk memulihkan 100% bisnis angkutan umum, bus yang beroperasi di Indonesia tidak akan beroperasi lagi.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian dampak kebijakan ini merujuk pada teori evaluasi CIPP menurut Stufflebeam dalam (Wirawan, 2012 : 92) Evaluasi adalah suatu proses dalam menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Model CIPP terdiri dari 4 jenis evaluasi, yaitu:

1. Konteks

Mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program.

2. Masukan/*input*

Untuk memilih rencana yang ada, menyiapkan proposal pendanaan, mengalokasikan sumber daya, menugaskan staf, merencanakan kerja, mengevaluasi rencana bisnis, dan menyiapkan rencana bisnis.anggaran.

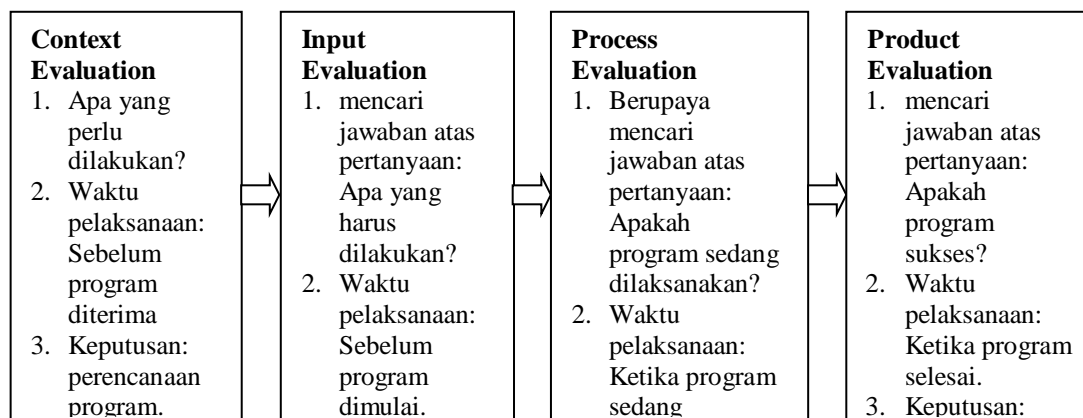
3. Proses

Berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktifitas dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat.

4. Produk

Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, yang direncanakan dan tidak direncanakan, jangka pendek dan jangka panjang.

Bagan 1
Proses Model Evaluasi
Context, Input, Process, dan Product (CIPP)



Keduanya dimaksudkan untuk membantu karyawan memfokuskan upaya mereka untuk mencapai manfaat penting, dan pada akhirnya untuk membantu kelompok pengguna yang lebih luas mengukur seberapa sukses upaya mereka dalam memenuhi kebutuhan target. Transportasi

Arti transportasi menurut Morlok (1978) adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Untuk mencapai mobilitas yang cepat dan aman, untuk memenuhi kebutuhan kapasitas transportasi, diperlukan kendaraan atau infrastruktur yang mendukung mobilitas. Penyediaan sarana penunjang gerakan disesuaikan dengan jenis modalitas yang digunakan. Masing-masing moda transportasi berikut (Setijowarno dan Frazila, 2001) memiliki karakteristik kinerja yang berbeda, terutama mengenai:

- a. Kecepatan, menunjukkan waktu tempuh antara dua tempat
- b. Ketersediaan layanan, terkait dengan kemampuan menjalin hubungan antara dua tempat.
- c. Keandalan operasi, menunjukkan perbedaan yang terjadi antara jadwal yang sebenarnya dan yang ditentukan.
- d. Kapasitas adalah kemampuan untuk dapat menangani segala bentuk dan kebutuhan transportasi. Frekuensi adalah jumlah perjalanan atau sambungan yang direncanakan.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Coronavirus merupakan kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini dapat menyebabkan infeksi pernapasan yang

serius, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Ada lagi new coronavirus (Covid19) adalah virus baru yang menyebabkan penyakit pernapasan. Virus ini berasal dari Cina. Virus corona baru ini termasuk famili virus penyebab SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) dan MERS (Dampak Timur Tengah dari kebijakan Covid19 terhadap operasional bus di Kabupaten Ogan Komering Ulu).

Spread pada penyebaran virus Corona atau Coven19, dampak buruk pada kontinuitas kegiatan transportasi, salah satunya adalah operasi bus transmisi. Bahkan beberapa saat yang lalu, Ketua Organda Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa seluruh armada bus terpaksa dikandangkan untuk sementara waktu hingga berdampak pada supir bus yang harus dirumahkan hingga pengangguran pun bertambah selama pandemi corona berlangsung.

Transport Corporation Indonesia (MTI) mengkritik kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona. Kebijakan pemerintah dinilai tidak akan mempengaruhi pelaku komersial di sektor jasa angkutan umum. Sejak diberlakukannya kebijakan physical dan social distancing, pendapatan perusahaan angkutan umum mengalami penurunan. Saat ini bisnis angkutan umum sedang terdampak dan pemerintah bisa menyiapkan program untuk menghidupkan kembali bisnis angkutan umum. Bus yang bekerja 100% di Indonesia sudah tidak beroperasi lagi.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi alami. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Tujuan Kebijakan

Secara garis besar, kebijakan transportasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia harus berpegang pada dua prinsip: efektivitas pembatasan sosial dan kepastian kelangsungan pengiriman barang, terutama kebutuhan pokok. Tujuan kebijakan PSBB dan PPKM pada pengendalian operasional bus sangat berdampak pada pengusaha transportasi, masyarakat terutama pengguna/penumpang bus dan supir bus itu sendiri. Pemberlakuan PSBB maupun PPKM bagi pelaku usaha transportasi berdampak pada penurunan penumpang dan penghasilan. Permasalahan kurangnya pemasukan pelaku usaha transportasi bisa berdampak pada dirumahnya supir bus, sehingga tujuan yang pertama kebijakan dibuat untuk menekan penyebaran covid-19 dapat diatasi tapi tujuan kebijakan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat menjadi terabaikan.

b. SDM

SDM yang dimaksud disini ialah supir yang terdampak kebijakan dan pegawai dinas perhubungan dalam mensosialisasikan kebijakan operasional bus di Kabupaten Ogan Ulu.

Dalam menyampaikan sosialisasi kebijakan operasional bus, pegawai dinas perhubungan telah sesuai dengan ketentuan dan jelas mengenai informasi kebijakan operasional bus tersebut yaitu selain melakukan pembatasan jumlah penumpang dan operasional transportasi umum juga mempercepat waktu operasional terminal bus antarkota antar provinsi (AKAP) di masa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun permasalahannya terkadang masyarakat merasa tidak paham dan kerumitan persyaratan dalam kebijakan tersebut maka mereka merasa sosialisasi kebijakan tersebut belum jelas.

Meskipun opini publik pada dasarnya adalah masyarakat dan pelaku usaha menerima hasil apapun dari kebijakan publik, sebagian besar menganggap kebijakan tersebut menjadi suboptimal ketika mereka menghadapinya. Beberapa kebingungan karena aturan yang kurang lebih ditegakkan di lapangan membuat orang merasa terkekang dalam ruang mereka, mereka merasa sangat ribet jika harus berkeliling menyiapkan persyaratan mulai dari label vaksin, hasil PCR, dll.

Input

a. Manfaat Kebijakan

Untuk manfaat kebijakan pun dirasa belum sepenuhnya efektif

karena dampak kebijakan yang dilakukan belum dijalankan secara maksimal.

manfaat kebijakan pun dirasa belum sepenuhnya efektif karena dampak kebijakan yang dilakukan belum dijalankan secara maksimal karena adanya permasalahan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut banyak masyarakat yang berdampak buruk terutama pada supir bus yang dirumahkan akibat dari pendapatan yang berkurang.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan agar tetap dapat memproduksi dan mengimpor bahan dan barang untuk masyarakat selama masa pandemi, serta operasional toko di gudang untuk menjamin kelangsungan pasokan barang. Peningkatan jumlah moda angkutan manusia di suatu kawasan yang tidak lagi mampu menampung lokasi tertentu (terminal) dan mengimbangi peningkatan jumlah orang yang menggunakan jasa angkutan (penumpang) modal yang terkumpul di kawasan stasiun juga mengganggu lalu lintas antara kendaraan yang masuk dan keluar stasiun, mengurangi keamanan dan mobilitas sistem lalu lintas.

b. Anggaran yang dibutuhkan

Anggaran yang dimaksud dalam hal ini ialah anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Akibat dari covid-19 sangat berdampak pada penerimaan pendapatan bus, seperti diungkap dari kompas.com tahun 2021 menurunnya angka pendapatan bus sampai 40% di akibatkan dari pandemic (kompas.com).

Anggaran pendapatan perusahaan berkurang akibat dari dampak kebijakan covid-19 tentang pengendalian operasional bus, khususnya di terminal tipe A batu kuning. Perbandingan sebelum pandemi Covid-19 penumpangnya banyak. Sekarang tidak lagi. Seperti angkutan kota (angkot) sekarang hanya bisa menambang 2 hingga 3 kali seminggu, karena sepi penumpang. Biaya operasional tidak tertutupi. Dampaknya banyak PHK. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 menimbulkan dampak tidak hanya di bidang kesehatan tetapi di bidang ekonomi terutama pendapatan moda transportasi dan gaji supirnya.

c. Sarana dan prasarana

Penyebaran wabah penyakit coronavirus 2019 (COVID19) di semua negara di dunia sedang berjuang, termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan wabah virus menjadi pandemi yang menyebar secara global, sangat cepat dari waktu ke waktu. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya mobilitas moda transportasi akibat kebijakan Pemerintah yang terbatas. Akibatnya, pemerintah pusat dan daerah telah membuat berbagai kebijakan untuk menangani penyebaran COVID-19 serta kebijakan untuk memitigasi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi ini. Namun, penerapan kebijakan yang berbeda ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk menentukan efektivitasnya.

Process

a. Proses pelaksanaan kebijakan

Pokja Nasional telah mengeluarkan surat edaran tentang

kriteria pembatasan pergerakan orang untuk mempercepat penanganan COVID19. Kementerian Perhubungan merespon kebijakan tersebut dengan melakukan pengendalian proses implementasi kebijakan moda transportasi darat, laut, dan udara Sesuai Pergub 18 Mei 2020 Sumsel tentang Pemberlakuan PSBB Covid19 di Provinsi Sumsel, membatasi jumlah penumpang maksimal 50%. (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan/alat angkut untuk setiap moda transportasi. transportasi, memberlakukan ketentuan social distancing (jarak fisik) antar penumpang, termasuk armada; dan angkutan penumpang pada prasarana transportasi darat dan kendaraan penunjangnya sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, sesuai dengan ketentuan jarak fisik antar penumpang, termasuk seluruh armada.

b. Kebijakan operasional bus blm rapi

Adapun terminal tipe A batu kuning kabupaten OKU juga menjalankan penanganan covid-19, diantaranya :

- a) Penilaian risiko dan pengendalian risiko Covid19 di setiap karyawan. Penyesuaian : Klinik ini juga membuat daftar karyawan berisiko tinggi, seperti identitas asli jika terkena risiko penularan Covid19
- b) Pengumpulan pembatasan dan penerapan celah sosial dan implementasi jarak fisik keselamatan untuk kendaraan transportasi karyawan. Instalasi : Jenis jenis batu emas yang tata letak sistem bandara

di area pengumpulan untuk menganalisis keterbatasan penumpang kerumunan dan bus karena penerapan jarak fisik. Kapasitas penumpang hanya 50ili dalam total kapasitas penumpang.

- c) Membiasakan dan menyediakan sarana bagi karyawan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Terminal tipe A batu kuning melengkapi fasilitas cuci tangan di beberapa titik strategis (assembly area, shuttle bus, shuttle dan angkutan pria, area pergantian tim, area penanganan, dll). Terminal Tipe-A Batu Kuning juga membagikan hand sanitizer spray kepada setiap karyawan dan melakukan pengisian ulang pada selang waktu yang ditentukan.
- d) Terminal tipe A batu kuning melakukan desinfeksi kendaraan operasional dengan penyemprotan cairan desinfektan pada setiap akhir shift atau dua kali sehari. juga menjadwalkan penyemprotan lingkungan dan fasilitas perusahaan (kantor, staging area, shift bungalow, dll)
- e) Menerapkan sistem deteksi dini. MOD Kesehatan adalah penilaian diri dari status kesehatan pra-kerja karyawan.
- f) Terminal Batu kuning Kelas A menyediakan ruang isolasi bagi karyawan yang diidentifikasi memiliki gejala COVID19 melalui formulir MOD yang sehat, sebelum diperiksa oleh tim medis.

- g) Mengembangkan dan menerapkan manajemen darurat COVID19 yang sesuai dengan kebijakan dan ketentuan perusahaan. Adaptasi: Terminal Batu Kuning Kelas A menyatukan Tim Mitigasi SATGAS COVID19, bekerja langsung dengan Tim Mitigasi SATGAS COVID19.
- h) Lakukan rapid test bila perlu. Koreksi: Terminal tipe A batu kuning telah melakukan 5 tes cepat pada staf dan akan terus melakukannya.

Product

Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan

Hasil kajian interdisipliner terhadap perkembangan kondisi COVID19 di tingkat nasional menyarankan perlunya penyesuaian beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Gugus Tugas Penyakit Viral versi 2021. Corona (COVID19) 2021 terkait pengaturan perjalanan warga selama virus Corona (COVID19) pandemi 2019. Penerapan pengecualian kebijakan pembatasan pergerakan orang menggunakan semua layanan Moda transportasi sangat berisiko terhadap penyebaran Covid19. Sementara itu, diperlukan manajemen langsung dan cepat dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 untuk mengendalikan sektor transportasi dalam negeri. Kebijakan pengecualian untuk membatasi pergerakan orang yang menggunakan semua moda transportasi harus ada di baris perintah. Jika anggaran rumah tangga menyatakan bahwa kelompok kerja harus mengambil alih, kami akan menetapkan tugas ke kelompok kerja. Tidak boleh abu-

abu. Pelaksanaan kebijakan tersebut sebenarnya melibatkan instansi pemerintah yang berbeda, melalui kementerian, lembaga pemerintah dan organisasi terkait lainnya, sehingga perlu adanya keterpaduan dalam pengelolaannya. terutama mengganggu masyarakat yang menggunakan jasa transportasi. Sementara itu, Surat edaran nomor 4 tahun 2020 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan memberlakukan prosedur kebersihan yang ketat. Kedua, meningkatkan keberhasilan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan efektivitas operasional transportasi dalam rangka menjawab kebutuhan nasional dalam keadaan darurat bencana COVID-19 yang tidak biasa.

Surat Edaran Gugus Tugas Nasional juga menetapkan kriteria untuk mengecualikan penduduk yang mungkin memiliki akses ke moda transportasi, seperti pegawai swasta yang menyediakan layanan dasar atau pasien yang membutuhkan layanan medis, layanan medis darurat. Namun, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan permintaan pengecualian, seperti surat tugas. Berdasarkan hal tersebut di atas, kebijakan yang dapat dikembangkan untuk menghindari hal tersebut, setidaknya ada empat jenis kebijakan maritim yang dapat ditempuh oleh pemerintah:

1. Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah membatasi atau mengurangi arus penumpang harus fokus pada penghapusan kegiatan dan tidak membatasi layanan transportasi.

Pembatasan layanan seperti pengurangan frekuensi layanan kereta api atau bus yang mungkin diberlakukan pada waktu-waktu ekstrem hanya dapat diterapkan jika dan hanya jika penerapan model bisnis jarak jauh optimal. Pembatasan tersebut hanya dapat menunda puncak pandemi tetapi tidak dapat mencegah atau mengurangi pandemi itu sendiri.

2. Pemerintah harus menjamin keselamatan pengemudi dan mereka yang bekerja untuk mengoperasikan stasiun kereta api, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan dan pusat distribusi lainnya. Pemerintah harus memperketat prosedur kerja, termasuk menjaga kebersihan. Pemerintah juga harus memastikan penyediaan alat serta pakaian kerja dan masker bagi pekerja di sektor transportasi. Perhatian khusus juga harus diberikan kepada pengemudi pengiriman online dan layanan transportasi penumpang yang sekarang banyak digunakan di kota-kota besar. Mengingat situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, jumlah masyarakat yang menggunakan layanan pesan-antar makanan melalui pemesanan online kemungkinan akan meningkat.
3. Untuk kendaraan pribadi dan barang, mobil pengangkut dan truk tetap dapat digunakan selama masa pandemi. Jika pembatasan tinggi diperlukan, prioritas harus selalu diberikan kepada kendaraan angkutan untuk menjamin kelangsungan kebutuhan penting.
4. Untuk perjalanan kota, pembatasan pergerakan penumpang dapat dilihat sebagai langkah untuk menunda

puncak penularan COVID-19. Sementara itu, di sisi lain, daya angkut barang melalui udara, laut dan kereta api harus dijaga untuk menjamin pasokan obat-obatan dan kebutuhan.

Dampak kebijakan covid-19

Dampak dari kebijakan Covid19 merupakan salah satu faktor yang dapat memperparah penyebaran penyakit, selain itu juga merupakan sarana penting untuk menjamin ketersediaan bahan pokok pada saat terjadi bencana alam. Di satu sisi, kendaraan dan infrastruktur bukan merupakan vektor penularan COVID-19. Di sisi lain, industri dapat memastikan keamanan yang menyediakan kebutuhan dasar. Jelaskan strategi ini tentu akan mempengaruhi industri transportasi karena dikaitkan dengan mobilitas orang yang berkurang. Salah satu kebijakan transportasi yang coba diterapkan pemerintah daerah terkait COVID-19 adalah membatasi pelayanan angkutan umum di Sumsel, meski akhirnya dikritik banyak pihak, justru menyebabkan kelebihan penumpang di beberapa terminal dan stasiun meningkatkan risiko penularan.

Akibat dari pembatasan sosial berskala besar dan pengendalian operasional bus dengan jam operasi dan penumpang yang dibatasi, mengakibatkan turunnya pendapatan bus sehingga banyaknya supir bus yang dirumahkan, hal ini tidak bisa menutup kemungkinan meningkatnya jumlah pengangguran bertambah karena banyak angkutan yang harus dikandangkan selama pandemi corona berlangsung. Bahkan beberapa waktu lalu Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat

(Organda) Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa seluruh armada bus terpaksa dikandangkan untuk sementara waktu hingga berdampak pada supir bus yang harus dirumahkan.

Menurut surat edaran Pokja, perjalanan yang diizinkan terbatas pada orang yang bekerja pada organisasi pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan kegiatan tertentu, pasien yang membutuhkan perawatan medis, tunjangan darurat, dll yang diberikan kepada keluarga almarhum dan PMI yang dipulangkan., Indonesia warga negara dan pelajar dari luar negeri ke tanah air. Calon penumpang juga harus mematuhi prosedur kesehatan, memenuhi persyaratan berupa izin perjalanan dan dokumen tertentu, serta memenuhi kriteria izin perjalanan.

A. Context

Tujuan kebijakan PSBB dan PPKM pada pengendalian operasional bus sangat berdampak pada pengusaha transportasi, masyarakat terutama pengguna/ penumpang bus dan supir bus itu sendiri. Pemberlakuan PSBB maupun PPKM bagi pelaku usaha transportasi berdampak pada penurunan penumpang dan penghasilan. Permasalahan kurangnya pemasukan pelaku usaha transportasi bisa berdampak pada dirumahkannya supir bus, sehingga tujuan yang pertama kebijakan dibuat untuk menekan penyebaran covid-19 dapat diatasi tapi tujuan kebijakan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat menjadi terabaikan.

Sosialisasi kebijakan pengoperasian bus, staf penjualan angkutan mematuhi peraturan dan informasi yang jelas tentang kebijakan

pengoperasian bus, selain pembatasan jumlah penumpang dan operasi angkutan normal Hal ini juga mempercepat waktu pengoperasian bus antar kota stasiun. (AKAP) selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun persoalannya, terkadang masyarakat merasa tidak paham dan rumitnya tuntutan politik membuat sosialisasi politik menjadi tidak jelas.

B. Input

Manfaat kebijakan pun dirasa belum sepenuhnya efektif karena dampak kebijakan yang dilakukan belum dijalankan secara maksimal karena adanya permasalahan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut banyak masyarakat yang berdampak buruk terutama pada supir bus yang dirumahkan akibat dari pendapatan yang berkurang.

Anggaran pendapatan perusahaan berkurang akibat dari dampak kebijakan covid-19 tentang pengendalian operasional bus, khususnya di terminal tipe A batu kuning. Perbandingan sebelum pandemi Covid-19 penumpangnya banyak. Sekarang tidak lagi. Seperti angkutan kota (angkot) sekarang hanya bisa menambang 2 hingga 3 kali seminggu, karena sepi penumpang. Biaya operasional tidak tertutupi. Dampaknya banyak PHK. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 menimbulkan dampak tidak hanya di bidang kesehatan tetapi di bidang ekonomi terutama pendapatan moda transportasi dan gaji supirnya.

C. *Process*

Implementasi kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 18 Mei 2020 Tentang PSBB Dalam Penanganan Covid19 Di Provinsi Sumsel yang membatasi jumlah penumpang maksimal 50% (lima puluh lima puluh persen.) kapasitas angkutan umum. /Peralatan. Otoritas Perhubungan Sumsel, khususnya Otoritas Ogan Komering Ulu, memberlakukan pembatasan jam operasional dan jumlah penumpang bus Antar Kota dan Antar Kota (AKAP) selama masa PSBB. Namun saat ini, operasional bus AKAP hanya tersedia untuk penumpang yang memenuhi kriteria perjalanan. Hal ini mengakibatkan dibukanya kembali layanan bus yang beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan dan aturan kriteria penumpang yang ditetapkan.

D. *Product*

Hasil kajian lintas sektor terhadap perkembangan kondisi COVID-19 di tingkat nasional, menunjukkan perlunya penyesuaian sejumlah ketentuan dalam surat edaran satgas penyakit virus corona 2019 (COVID19) edisi 17 tahun 2021 tentang pengaturan perjalanan bagi warga negara selama pandemi Coronavirus 2019 (COVID19). Akibat meluasnya pembatasan sosial dan terbatasnya pengendalian operasional bus dari segi jam operasional dan penumpang, mengakibatkan berkurangnya pendapatan bus yang mengakibatkan banyak pengemudi bus yang di PHK, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya potensi pengangguran yang semakin meningkat karena banyaknya kendaraan yang

mengalami PHK. akan diberhentikan selama pandemi corona. Seluruh konvoi bus harus melakukan break ground untuk sementara waktu, menyebabkan para sopir bus dipulangkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. **Context** : kebijakan PSBB dan PPKM pada pengendalian operasional bus berdampak pada pengusaha transportasi, masyarakat terutama pengguna/ penumpang bus dan sopir bus itu sendiri. masyarakat merasa tidak paham dan kerumitan persyaratan dalam kebijakan tersebut maka mereka merasa sosialisasi kebijakan tersebut belum jelas terkait kebijakan operasional bus.
2. **Input**: Manfaat kebijakan belum sepenuhnya efektif hal ini terlihat dari dampak kebijakan yang dilakukan belum dijalankan secara maksimal karena adanya permasalahan dalam pengimplementasian kebijakan. Perbandingan di terminal tipe A batu kuning, sebelum pandemi Covid-19 penumpangnya banyak sekarang tidak lagi. Dampaknya banyak terjadi PHK pada sopir karena penurunan pendapatan moda transportasi.
3. **Process**: Proses pelaksanaan kebijakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 18 Mei Tahun 2020 tentang PSBB dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Sumsel membatasi jumlah

penumpang paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan/alat angkut untuk setiap moda transportasi dan pembatasan jam operasional serta jumlah penumpang bus antarkota dan antar provinsi (AKAP) selama masa PSBB berlangsung.

4. **Product:** Akibat dari pembatasan sosial berskala besar dan pengendalian operasional bus terkait jam operasi dan pembatasan penumpang mengakibatkan turunnya pendapatan bus sehingga banyaknya supir bus yang dirumahkan sehingga meningkatnya jumlah pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen CK). 2010. *Pedoman Pengelolaan Terminal Di Kabupaten/Kota*. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
- Direktorat Jendral Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat). 1998. *Pedoman Teknik Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Raya Dalam Kota dan Antar Kota*. Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat Direktorat Bina Sistem Prasarana.
- Morlok, Edward K. 1994. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Erlangga.
- Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George R. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warpani, Suwajoko. 1990. *Merencanakan Sistem Pengangkutan*. Bandung: Penerbit ITB.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Handayani, Soewarno. 2002. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. 2008. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Haji Masagung.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Schermerhorn Jr, Jhon R. 2003. *Manajemen*. Buku I, Edisi Bahasa Indonesia. Terjemahan oleh M. Purnawa Putranta dkk. Yogyakarta: Andi.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Singarimbun, Masri & Effendi, Sofian. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi*

Peraturan dan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Terminal Type B Km 32 Indralaya

Sushernawan, Prasetya, Sulistyowati dan Fitriyah. 2014. *Sistem Pengelolaan Terminal Manp-kanp- Knta*, Senkiraiw. *Turnal Ilmil Pemerintahan*

Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor: 29 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengolahan Dan Retribusi Terminal Tipe A Batu Kuning

Website :

Purba Djamahaen. 2008. *Analisis Prioritas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Fungsi Terminal Sarantama (Studi Kasus Terminal Sarantama Kota Pematang Siantar)*. Jurnal Universitas Sumatera Utara (Online). Tersedia: <http://jurnal.usu.ac.id> (diakses 10 Agustus 2014).

Universitas Diponegoro (Online), Volume : Nomor: Tahun 2014 Halaman Tersedia: <http://www.fisip.undip.ac.id> (diakses 10 Agustus 2014)